

ANALISIS KEBUTUHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

(ANALYSIS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT NEEDS OF THE SOCIAL AND GOVERNMENT SECTOR OF THE REGENCY / CITY OF EAST KALIMANTAN PROVINCE)

Adi Hendro Purnomo, Pebiansyah Hapsari

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Jl. MT. Haryono No. 126 Samarinda
Email : adihendr@gmail.com

Diterima: 15 Agustus 2019; Direvisi: 29 Oktober 2019; Disetujui: 25 November 2019

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk membahas kebutuhan kegiatan Kelitbangan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur periode 2018-2023. Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi kebutuhan penelitian ini dengan cara melakukan analisis kebutuhan (*need analysis*) yang terdiri dari 2 (dua) tahapan: (1) Analisis situasi yaitu daftar karakteristik dari situasi 2018-2023 (visi-misi kepala Daerah, renstra, dan isu-isu strategis lingkungan berdasarkan investarisasi penelitian periode sebelumnya, dan 2) daftar kesenjangan penelitian yang diperlukan untuk mencapai tujuan masa depan (2018-2023). Penelitian menggunakan data primer dan sekunder, Data primer diperoleh dari wawancara dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Kabupaten/kota terkait di Provinsi Kalimantan Timur. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen instansi terkait. Hasil kegiatan merupakan inventarisasi kebutuhan penelitian kab/kota untuk periode 2018-2023.

Kata Kunci: Analisis Kebutuhan Penelitian, Bidang Sosial dan Pemerintahan

ABSTRACT

This article aims to discuss the of research and development activities needs in the Regency / City of East Kalimantan Province for the period 2018-2023. The method used in this research is by conducting a needs analysis consisting of 2 (two) stages: (1) Situation analysis which is a list of characteristics of the situation 2018-2023 (Regional head's vision-mission, strategic plan, and environmental strategic issues based on previous period research investment, and 2) list of research gaps needed to achieve future goals (2018-2023). The study used primary and secondary data. Primary data were obtained from interviews and consultations with the relevant Regional Work Units (SKPD) in related Regencies / Cities in East Kalimantan Province. Secondary data was obtained from the study of relevant agency documents. The results of the activities were an inventory of district / city research needs for the period 2018-2023.

Keywords: *Research Needs Analysis, Social and Government Sector*

PENDAHULUAN

Dunia tengah memasuki perubahan dari era industri ke era pengetahuan (Uhl-Bien et al., 2007). Pada era pengetahuan, sumberdaya pengetahuan (ide dan inovasi) semakin berharga (Brynjolfsson, McAfee, dan Spence, 2014). Sumberdaya pengetahuan sebagai sumber keunggulan kompetitif bagi setiap organisasi pada lingkungan organisasi yang semakin kompetitif, kompleks dan berubah semakin dinamis (Grant, 1996; Curado, 2006). Pentingnya sumberdaya pengetahuan dan inovasi terhadap daya saing tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) bahwa “mewujudkan bangsa yang berdaya saing dilakukan diantaranya dengan peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi yang berkelanjutan”.

Lembaga Kelitbangan mempunyai posisi strategis yang merupakan salah satu unsur utama Sistem Inovasi Nasional (SINas) (Lakitan, 2011) yang berkelanjutan. Menurut Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Permendagri no 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan sebagai tugas utama. Selain itu terdapat kegiatan pendukung yang meliputi peningkatan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi daerah, pengembangan basis data kelitbangan, penguatan kerjasama kelitbangan; dan pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya. Serta kegiatan penunjang yang meliputi fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi.

Kegiatan penelitian dan pengembangan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan salah satu aspek strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan yaitu untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan (Labadjo, 2008) di era pengetahuan. Pada lingkungan organisasi yang kompleks dan berubah secara dinamis, penetapan kebijakan oleh daerah harus dilakukan secara cermat, yang didasarkan pada: kondisi dan potensi lokal, keterkaitan dan pengaruh lingkungan strategis, serta memiliki prediksi yang akurat yaitu efektif, efisien dan terukur terhadap arah pembangunan daerah dalam jangka panjang (Labadjo, 2008). Pemerintah perlu terus mendorong upaya-upaya peningkatan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan, khususnya dalam rangka mendorong dan memfasilitasi penelitian dan pengembangan berbasis kebutuhan dan kemanfaatan ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sejak berdiri tahun 2001 hingga kini, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur telah banyak melakukan kegiatan kelitbangan baik yang bersifat teknis maupun kebijakan dan telah banyak pula rekomendasi yang disampaikan baik kepada Gubernur maupun kepada Instansi/SKPD yang menjadi lokus/obyek dari kegiatan kelitbangan tersebut. Namun pada kenyataannya citra litbang masih belum positif, terkait dengan isu bahwa orientasi kelitbangan yang dilakukan di sebagian besar lembaga litbang pemerintah belum dirasakan memberikan kontribusi nyata terhadap upaya memenuhi kebutuhan atau menyediakan solusi bagi persoalan yang dihadapi masyarakat, pemerintah, atau dunia usaha (Lakitan, 2011). Lakitan (2011) juga mengemukakan bahwa banyak kegiatan kelitbangan yang dilakukan masih berupa ‘*academic exercise*’ dan belum secara sensitif merespon realita yang dihadapi. Untuk memperoleh hasil kegiatan kelitbangan yang efisien dan efektif, dibutuhkan pengelolaan yang optimal. Salah satunya adalah aspek perencanaan kelitbangan. Oleh karena itu dibutuhkan inventarisasi terhadap kebutuhan kegiatan kelitbangna yang merupakan *entry point* bagi input sistem kelitbangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan atau lembaga lainnya di Provinsi/Kabupaten/Kota dan kabupaten/kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan kelitbangan serta administrasi dan manajemen di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi untuk selanjutnya disebut Badan Litbang Daerah Provinsi adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Lembaga litbang tidak boleh menjadi suatu entitas yang terisolir dari realita kebutuhan dan persoalan masyarakat dan negara. Menurut OECD (2002), kegiatan litbang tidak hanya mencakup upaya untuk menambah stok pengetahuan, tetapi juga perlu menyiapkan agar stok pengetahuan tersebut dapat diaplikasikan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan di daerah. Robinson et al. (2011) berpendapat bahwa identifikasi kebutuhan dan analisis kesenjangan penelitian adalah langkah penting dalam mengembangkan agenda penelitian, termasuk keputusan tentang pendanaan dan desain penelitian. Lembaga litbang sebagai pengembang iptek perlu: (1) mengevaluasi kembali tentang kesesuaian orientasi pengembangan iptek dengan kebutuhan umat dan negara (isu relevansi riset); dan (2) meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi umat dan negara (isu sensitivitas pelaku pengembang iptek) (Lakitan, 2011).

Menurut McKillip (1987), "Kebutuhan adalah penilaian nilai: bahwa kelompok sasaran memiliki masalah yang dapat diselesaikan". Analisis kebutuhan dalam hal ini mencakup pekerjaan-pekerjaan penentuan kebutuhan atau kondisi yang harus dipenuhi dalam suatu produk baru atau perubahan produk (dalam hal ini produk penelitian), yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan antar berbagai pemangku kepentingan. Aktivitas tersebut penting, termasuk seperti alokasi sumber daya, dana hibah, dan perencanaan. Dengan kata lain, penilaian kebutuhan adalah proses evaluasi masalah, identifikasi solusi serta menekankan pentingnya dan relevansi masalah dan solusi. Menurut McKillip (1987), model penilaian kebutuhan diantaranya adalah Model Pengambilan Keputusan dan Model Ketidaksesuaian (kesenjangan). Model Pengambilan Keputusan merupakan adaptasi dari analisis manfaat multi atribut (MAUA) untuk pemodelan masalah dan sintesis dalam penelitian terapan. Model pengambilan keputusan memiliki tiga tahap: (1) Pemodelan masalah yaitu identifikasi masalah, opsi (pilihan) masalah yang akan menjadi prioritas untuk atribut keputusan. (2) Kuantifikasi yaitu pengukuran dalam identifikasi kebutuhan yang mencerminkan nilai-nilai dan minat para pengambil keputusan. (3) Sintesis. Pada tahap ini, menganalisis opsi (pilihan) terhadap kebutuhan yang akan diberikan. Hasil tahap ini juga memberikan informasi tentang kedudukan relatif dari kebutuhan-kebutuhan.

Menurut McKillip (1987), model Ketidaksesuaian (analisis kesenjangan) yaitu kesenjangan antara: masalah-solusi, harapan-kenyataan. Model Ketidaksesuaian menekankan harapan normatif dan melibatkan tiga fase: (1) Penentuan tujuan, mengidentifikasi apa yang seharusnya, (2) Pengukuran capaian (3) Identifikasi ketidaksesuaian, yaitu perbedaan antara

apa yang seharusnya dan apa yang tersedia. Model analisis kesenjangan (gap) digunakan untuk menentukan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk berpindah dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan atau keadaan masa depan yang diinginkan. Analisa gap terdiri dari tiga komponen faktor utama yaitu: 1). daftar karakteristik dari situasi sekarang (apa yang ada saat ini), 2). daftar apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan masa depan (apa yang harus dipenuhi), dan 3). daftar kesenjangan apa yang ada dan perlu diisi. Analisis kesenjangan mendorong organisasi atau perusahaan untuk merenung status dan kemampuan apa yang saat ini dimiliki oleh organisasi dan status apa yang ingin dicapai dimana di masa depan. Jadi dengan lain kata analisa gap adalah studi yang dibuat untuk mengidentifikasi apakah sistem saat ini telah memenuhi kebutuhan. Analisa gap mengidentifikasi gap (kesenjangan) antara bagaimana operasi kegiatan diperlukan untuk merespon apa yang diinginkan namun belum atau tidak bisa penuhi. Sasaran awal dari analisa gap adalah: mengumpulkan kebutuhan, menentukan penyesuaian (*customization*) yang diperlukan, memastikan produk/proses/sistem yang baru memenuhi kebutuhan. Langkah-langkah dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Ranking Kebutuhan, memastikan area-area yang penting bagi organisasi yang memberikan nilai tambah; 2). *Degree of Fit* yaitu menentukan sejauh mana kebutuhan dapat diakomodir; 3) *Gap Resolution* yaitu menentukan alternative dan merekomendasikan solusi untuk mengatasi gap yang ada.

METODE

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi kebutuhan penelitian ini dengan cara melakukan identifikasi kebutuhan (*research need identification*). Analisis kebutuhan dalam hal ini mencakup pekerjaan-pekerjaan penentuan kebutuhan berkaitan dengan produk penelitian, yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan yang bersinggungan antar berbagai pemangku kepentingan. analisis kebutuhan (*need analysis*) yang terdiri dari 2 (dua) tahapan: (1) Analisis situasi yaitu daftar karakteristik dari situasi 2018-2023 (visi-misi kepala Daerah, renstra, dan isu-isu strategis lingkungan berdasarkan investarisasi penelitian periode sebelumnya, dan 2) daftar kesenjangan penelitian yang diperlukan untuk mencapai tujuan masa depan (2018-2023). Penelitian menggunakan data primer dan sekunder, Data primer diperoleh dari wawancara dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Kabupaten/kota terkait di Provinsi Kalimantan Timur yang melakukan kajian/penelitian mengenai evaluasi kebijakan Bidang Sosial dan Pemerintahan. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen instansi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih 2018-2023

Visi Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023 ini dikenal dengan “VISI KALTIM BERDAULAT 2023”. Visi tersebut dapat diperinci dalam lima poin sebagai berikut. Pertama, Kalimantan Timur mampu melahirkan SDM yang bermartabat, berkualitas dan memiliki daya saing. Poin pertama (dari visi) ini mencerminkan semangat bahwa proses awal dalam pembangunan daerah adalah kualitas SDM-nya. Kedua, Kalimantan Timur mampu mengelola seluruh sumber daya alamnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan wawasan lingkungan.

Visi ketiga yaitu Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan, swasembada pangan dan ketercukupan sandang dan papan. Visi ini menegaskan semangat agar Kalimantan Timur dapat berdikari secara ekonomi dengan ditandai oleh keberadaan masyarakatnya yang ‘mantap’ secara ekonomi. Keempat adalah Kaltim mampu berintegritas dalam pemerintahan, hukum dan keadilan sosial demi terciptanya kedamaian dan ketertiban umum. Integritas juga dapat dipahami sebagai kesesuaian antara tutur kata dan

tindakan. Dengan menegaskan pentingnya integritas, pemerintahan yang bersih dan terbuka sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat. Visi kelima adalah Kaltim (dimungkinkan) mampu menjamin pemenuhan infrastruktur dan ketersediaan energi.

Sedangkan misi pembangunan Kalimantan Timur periode 2018-2023 adalah (1) Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas. (2) Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan. (3) Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan. (4) Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan. (5) Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik Dari beberapa permasalahan di atas, Balitbangda dapat mengambil peran sebagai penyedia sumber informasi dan dasar kebijakan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visi dan misinya tersebut.

2. Telaah Renstra Balitbangda Kaltim 2018-2023

Guna mendukung tercapainya Visi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menetapkan visi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut: “Terwujudnya Hasil Kelitbang yang Berkualitas dan Inovatif untuk Mewujudkan Kaltim yang Berdaulat“. Visi tersebut merupakan turunan dari Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023. Adapun Penjabaran Visi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur memiliki pengertian bahwa Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen bahwa hasil-hasil kelitbang yang dihasilkan oleh Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur memiliki kualitas dalam mendukung setiap langkah pemerintah untuk pembangunan daerah, dan memiliki pengertian bahwa Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur memberikan sumbangsinya untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Berdaulat melalui rekomendasi kebijakan yang inovatif dalam menghadapi permasalahan global, guna mendukung tercapainya tujuan dari visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Visi ini memiliki pengertian yang mempunyai pandangan jauh kedepan, agar keberadaan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur menjadi lebih inovatif dan antisipatif. Visi tersebut juga merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan kegiatan kelitbang untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 yaitu : “Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat “.

3. Identifikasi Isu-Isu Strategis Bidang Sosial Pemerintahan Berdasarkan Kajian yang Pernah dilakukan

Sejak Tahun 2009 Balitbangda Kaltim Bidang Sosial Pemerintahan telah menghasilkan 132 produk penelitian dan kajian. Penelitian dan Kajian tersebut di lakukan secara swadaya, kerjasama dengan konsultan dan Perguruan Tinggi baik di Kalimantan Timur dan dari luar Kalimantan Timur. Penelitian-penelitian tersebut sebagai bahan masukan kebijakan.

Tabel 1. Inventarisasi Penelitian yang Pernah Dilakukan di Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan

Balitbangda Kota/Kabupaten	Jumlah Kajian
Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara	10
Bapelitbang Kabupaten Kutai Timur	23
BP2D Kota Samarinda	10
Bapelitbang Kota Bontang	11
Balitbangda Kutai Kertanegara	78
Total	132

Sumber: Balitbang Kaltim (2018)

Berdasarkan Inventarisasi Penelitian yang Pernah Dilakukan di Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan (Tabel 2), ada 5 (lima) permasalahan utama yaitu: 1) rendahnya daya saing SDM Kaltim, 2) pertumbuhan ekonomi yang masih fluktuatif dan belum merata, 3) belum terpenuhinya pelayanan infrastruktur secara merata, 4) belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan 5) belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ditinjau dari permasalahan tersebut maka permasalahan yang terkait dengan pelayanan litbang Bidang Sosial Pemerintahan sebagai berikut :

1) Rendahnya Daya Saing SDM Kaltim

Berdasarkan dokumen Renstra Balitbangda Kaltim 2018-2023, masalah yang ditemui berkaitan dengan rendahnya daya saing SDM Kaltim, adalah masih rendahnya daya saing SDM Kalimantan Timur dengan masalah-masalah: (a) Tingkat kriminalitas tinggi, (b) belum meratanya akses, kualitas dan relevansi pendidikan, (c) masih rendahnya peran serta perempuan dalam pembangunan, (d) belum optimalnya peran serta dan prestasi pemuda dan disabilitas dalam pembangunan, (e) belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, (f) belum optimalnya kompetensi tenaga kerja lokal. Temuan tersebut memberikan implikasi penelitian di bidang sosial-budaya, kependudukan, pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2) pertumbuhan ekonomi yang masih fluktuatif dan belum merata

Berkaitan dengan misi kedua yaitu “Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan”, masalah yang ditemui adalah transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan berjalan lambat baik secara vertikal maupun horizontal. Masalah-masalah yang teridentifikasi dalam hal ini berkaitan dengan lingkup bidang sosial dan pemerintahan adalah: (a) belum optimalnya pemerataan pendapatan masyarakat, (b) kontribusi sektor diluar migas dan batubara masih rendah, (c) belum optimalnya pengembangan industri berbasis komoditas unggulan yang mampu meningkatkan nilai tambah. Kebutuhan penelitian ke depan berkaitan dengan Balitbang bidang Sosial dan Pemerintahan adalah dalam pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3) belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Berkaitan dengan misi kelima Kepala Daerah terpilih 2018-2023, beberapa isu permasalahan strategis adalah pemerintahan yang belum mencapai kinerja profesional dan akuntabel. Identifikasi masalahnya adalah: (a) akuntabilitas birokrasi pemerintahan masih belum mencapai predikat Sangat Baik, (b) Penyelenggaraan pelayanan publik masih berjalan lambat. Akuntabilitas birokrasi pemerintahan masih belum mencapai predikat Sangat Baik terutama pada Pemerintahan Desa, sehingga diperlukan dukungan penelitian berkaitan dengan pemberdayaan sumberdaya aparatur dan tatakelola di Pemerintah Desa seperti berkaitan dengan: kapasitas administrasi dan tata kelola birokrasi serta persoalan akuntabilitas pemerintah Desa dalam mengelola anggaran. Kebutuhan penelitian ke depan berkaitan dengan Balitbang bidang Sosial dan Pemerintahan adalah dalam sub bidang penelitian tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengkajian Peraturan dan pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4) belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Untuk misi keempat, masalahnya adalah penurunan kualitas lingkungan hidup. Dimana untuk hal ini dapat diidentifikasi masalahnya: (a) SDA belum memiliki nilai tambah dan berdaya saing, (b) masih tingginya emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Kebutuhan penelitian ke depan berkaitan dengan Balitbang bidang Sosial dan Pemerintahan di adalah pengembangan kesadaran, budaya hidup bersih, sehat dan perilaku inovasi dan peduli lingkungan.

4. Inventarisasi Kebutuhan Penelitian

4.1 Kebutuhan Penelitian Sub Bidang Sosial Budaya

Kebutuhan litbang Sub Bidang Sosial Budaya adalah berkaitan dengan isu-isu strategis: peran perempuan dalam pendidikan-kesehatan-ketahanan pangan, perlindungan disabilitas berbasis pemberdayaan, pemerataan akses pendidikan, masalah pendidikan karakter (Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing) dan akses pendidikan bagi pemuda, peran masyarakat dalam keamanan lingkungan, serta peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peran perempuan dalam pendidikan-kesehatan-ketahanan pangan perlu ditingkatkan baik di level individu, keluarga dan kelembagaan (misal PKK). Perubahan paradigma dalam menangani penyandang disabilitas tidak hanya diperlukan rehabilitasi, melainkan juga aksesibilitas, kesetaraan, keadilan dan pemberdayaan menjadi tantangan agenda litbang ke depan.

Kajian nilai-nilai religius, kerifan lokal juga banyak menjadi agenda penelitian. Balitbangda Kukar mengemukakan beberapa agenda penelitian seperti: Peranan Lembaga Adat Dalam Meningkatkan Motivasi, Pengetahuan dan Keterlampiran Masyarakat Terhadap Seni Budaya Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Peranan Lembaga Adat Dalam Meningkatkan Motivasi, Pengetahuan dan Keterlampiran Masyarakat Terhadap Seni Budaya Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kajian sosial budaya masyarakat terhadap kehidupan beragama di kabupaten Kutai Kartanegara, Kajian filosofi dan histori Upacara adat(kelahiran, Pengantin dan Kematian) di Kutai Kartanegara. Balitbangda Kutim mengemukakan beberapa agenda penelitian seperti: Kajian Peran Keluarga Dalam Mencegah Kenakalan Anak dan Remaja, Kajian kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan kearifan lokal (budaya).

Berkaitan dengan isu dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan membutuhkan dukungan litbang seperti: penengangan masyarakat miskin secara dil dan tepat sasaran melalui verifikasi, validasi dan integrasi data. Dukungan integrasi data berbasis elektronik (digital) juga menjadi tantangan kedepan. Bapelitbang PPU mengemukakan kebutuhan litbang Fenomena terus meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat (PMKS), Peningkatan perlindungan kesehatan untuk masyarakat bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat.

Kebutuhan litbang Sosial budaya dalam mendukung misi ke-3 yaitu Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan, yaitu berkaitan dengan pengembangan budaya untuk menjaga lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan. Balitbangda Kukar misalnya mengajukan kebutuha litbang Tentang lahan perkarangan dalam menunjang Ketahanan pangan rumah tangga Suku Kutai dan Suku Dayak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemanfaatan pekarangan sudah lama menjadi program sejak Orde Baru, namun belum menjadi bagian dari gaya hidup. Padahal pemanfaatan pekarangan mempunyai banyak manfaat, seperti: akses ke makanan lokal-segar-sehat-alami, mencukupi gizi (buah, sayuran), pangan alami, meningkatkan aktivitas fisik, memperbaiki keberlanjutan lingkungan. Balitbangda Kutim mengajukan kebutuhan litbang pengelolaan sampah berbasis keluarga. Beberapa agenda penelitian di topik ini juga mendukung misi ke-4 yaitu Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

4.2 Analisis Kebutuhan Penelitian Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Isu-isu strategis di sub bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan diantaranya berkaitan dengan: kualitas pelayanan dan tatakelola. Permasalahan tatakelola yaitu berkaitan dengan Akuntabilitas birokrasi pemerintahan masih belum mencapai predikat Sangat Baik. Permasalahan pelayanan publik yaitu Penyelenggaraan pelayanan publik masih berjalan lambat. Agenda riset di sub bidang ini meliputi lingkup: Penguatan inovasi daerah, mekanisme tatakelola, penatalaksanaan serta perbaikan administrasi dan birokrasi, survei kepuasan

masyarakat, kajian rehaulasi, dan pengembangan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik.

Balitbangda PPU mengajukan 5 (lima) kebutuhan libang, meliputi: (1) Penguatan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat, (2) Peningkatan peran aparat pengawas internal, (3) Implementasi terhadap peraturan perlindungan sosial, (4) Sinkronisasi program pembangunan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, (3) Peningkatan sumber daya manusia terutama aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan struktural eselon IV dan eselon III.

Balitbangda PPU mengajukan 7 (tujuh) kebutuhan libang, meliputi: (1) Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Dana Pembangunan yang Bersumber dari Pihak Swasta, (2) Evaluasi Kinerja Staf PNS dan Non PNS, (3) Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan Minimal, (4) Analisis Kebutuhan Pegawai untuk Jabatan Fungsional Tertentu, (5) Kajian Implementasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Kutai Timur, (6) Kajian Naskah Akademik Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, (7) Evaluasi Program Ketahanan Pangan.

Balitbangda BP2D Kota Samarinda mengajukan 7 (tujuh) kebutuhan libang, meliputi: (1) Penerapan komponen prangkat daerah terhadap internalisasi keluaran kelitbangan berupa rekomendasi kelitbangan dan kebijakan, (2) Mapping perencanaan dan penyusunan program kebutuhan Diklat Teknis untuk peningkatan kemampuan SDM ASN sebagai penunjang Kinerja Pemerintahan, (3) Layanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Samarinda melalui Era Digitalisasi pada setiap SKPD untuk memudahkan dan mensejahterakan masyarakat.

Bapelitbang Bontang mengajukan kebutuhan libang Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Balitbangda Kukar mengajukan 17 kebutuhan libang, diantaranya meliputi: Strategis Penguatan Program PADU-DESK (Pelayanan Administrasi Terpadu Desa dan Kelurahan) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Optimalisasi Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umu, Survey Kepuasan Masyarakat, Kajian Survey Indeks Persepsi Korupsi, Evaluasi Kebijakan daerah (Perda) pusat perbelanjaan dan toko modern, Evaluasi program dan pelaksanaan RPJMD, Penelitian Identifikasi Isu Strategis dan Aktual Sebagai Bahan Masukan Penyusunan Rencana Strategis, Strategis Penguatan Kelitbangan, Proyeksi Penataan dan Pemekaran Desa dan Kelurahan, Strategi Peningkatan Daya Saing, Pola karir, Aparatur Pemerintah, dan idektifikasi Isu Strategis dan Aktual Sebagai Bahan Penyusunan Rencana Induk Penelitian Bidang Pemerintahan Daerah Tahun 2021-2031.

4.3 Kebutuhan Penelitian Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kalimantan Timur merupakan provinsi yang kaya akan sumberdaya alam, dan sumberdaya alam harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim, dan bukan dimanfaatkan pemilik modal, investor asing, pihak luar. Masyarakat kaltim harus dapat menjadi pemain (subyek) di daerahnya sendiri bukan menjadi obyek. Kekayaan alam, sumber kearifan lokal menjadi potensi, namun masyarakat Kaltim terutama masyarakat golongan ekonomi-sosial menengah ke bawah mempunyai kendala untuk mandiri dan bersaing karena keterbatasan akses sumberdaya (informasi, pasar, keuangan, teknologi, *networking*) dan skala ekonomi.

Isu-isu strategis di tingkat kelembagaan diantaranya berkaitan dengan permasalahan kesiapan sumberdaya aparatur desa berkaitan dengan implementasi UU 6/2014 tentang Pemerintahan Desa. Terdapat beberapa masalah utama dalam masa transisi implementasi UU Desa. Pertama adalah terkait kapasitas administrasi dan tata kelola birokrasi di Desa yang masih rendah. Kelembagaan desa mempunyai manfaat sebagai organisasi horizontal seperti dalam memudahkan distribusi informasi dan sumberdaya untuk akses pelayanan publik seperti: pendidikan, pelatihan, adopsi teknologi, pembinaan. Kajian optimalisasi kelembagaan sosial

ekonomi di wilayah pedesaan menjadi agenda penelitian kedepan. Isu-isu strategis di level individu diantaranya adalah Pemberdayaan Tenaga kerja daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Masalah kemiskinan di Kaltim diantaranya terjadi dikarenakan tingginya angka perpindahan penduduk dari provinsi lain ke Kaltim namun tidak dibekali dengan keterampilan khusus yang dibutuhkan lapangan kerja yang tersedia.

Berkaitan dengan sub bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapelitbang PPU mengajukan 3 (tiga) kebutuhan libang yaitu: (1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan pembangunan terutama Sumber Daya Aparat Desa, (2) Pemberdayaan Tenaga kerja daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga, (3) Peningkatan kualitas Tenaga Kerja melalui pelatihan pada Balai Latihan Kerja (BLK),

Balitbangda Kutim mengajukan 4 (empat) kebutuhan libang yaitu: (1) Kajian Optimalisasi BUMDes, (2) Kajian Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*) Masyarakat Desa, (3) Kajian Peran Masyarakat terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan, (4) Kajian Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Ketentuan Mendirikan Bangunan. Kesadaran masyarakat terhadap perijinan IMB masih rendah, sehingga perlu pemetaan masalah di lapangan untuk daya dukung kebijakan.

Bapelitbang Kukar mengajukan kebutuhan libang yaitu: Kajian Pemberdayayaan Ekonomi Keluarga Berbasis Teknologi Tepat Guna, Efektifitas Peran Lembaga Adat Desa/Kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Survey Indeks Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Survey Indeks kemandirian Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, Implementasi perda No. 20 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, Partisipasi msyarakat dalam pemilu (pilpres, Pileg, Pilkada) di Kab. Kutai Kartanegara, Optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal pada perusahaan sektor swasta di kutai Kartanegara, Identifikasi pengembangan mitigasi (antisipasi deteksi dini) Bencana pesisir dan strategi pelibatan masyarakatnya di Kab. Kutai Kartanegara, dan Identifikasi pengembangan mitigasi (antisipasi deteksi dini) Bencana pesisir dan strategi pelibatan masyarakatnya di Kab. Kutai Kartanegara.

BP2D Kota Samarinda lebih fokus pengembangan infrastruktur untuk pemberdayaan, seperti: Membangun ruang terbuka untuk public yang bernilai edukasi, Pemanfaatan Museum Samarinda dan Taman Samarinda sebagai Destinasi Wisata, Pengembangan inovasi dan kemajuan Teknologi Informasi, Membangun dan membentuk karakter "CERDAS" (sermat, religi, berbudaya dan smart) untuk generasi muda. Bapelitbang Kukar mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya alam wilayah pesisir, pulau-pulau kecil kecil terluar dan laut. Pulau-pulau kecil terluar mempunyai karakteristik terisolir, rentan terhadap phenomena perubahan alam, masalah infrastruktur (ketersediaan sumber daya air, sarana transportasi, komunikasi, pendanaan, dan teknologi), dampak lingkungan, dampak terhadap subsisten dan komersial pertanian serta pengawasan pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini menjadi tantangan untuk mendukung visi Kaltim yang berdaulat.

KESIMPULAN

Maksud kegiatan Inventarisasi Kebutuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan adalah untuk mendapatkan gambaran kebutuhan penelitian dan pengembangan dan menghimpun hasil-hasil penelitian tentang evaluasi kebijakan Bidang Sosial dan Pemerintahan sehingga terjadi sinergitas kegiatan kelitbangan dengan kebutuhan stakeholder. Tujuan kegiatan ini adalah menyusun kebutuhan kegiatan Kelitbangan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan visi-misi Kepala Daerah terpilih untuk mewujudkan Kaltim yang berdaulat, serta berdasarkan isu-isu strategis lingkungan yaitu globalisasi, pasar bebas, era pengetahuan dan peningkatan kesadaran pembangunan yang berkelanjutan dikaitkan urgensi daerah, maka di butuhkan kemandirian, daya saing dan kompetensi masyarakat baik di tingkat individu, kelompok dan kelembagaan untuk mandiri, berdaulat dan berdaya saing. Penelitian di Bidang

Sosial Pemerintahan mempunyai peran strategis untuk mendukung visi Kepala daerah terpilih 2018-2023 yaitu Kaltim yang berdaulat melalui pengembangan litbang berdasarkan isu-isu faktual dalam penguatan nilai-nilai sosial dan budaya serta pemberdayaan baik di level individu, keluarga, masyarakat dan kelembagaan. Pelaksanaan program dan kegiatan inventarisasi kebutuhan litbang akan difinalisasi berdasarkan masukan para pihak dan ketersediaan sumberdaya untuk ditindaklanjutan pada kegiatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Balitbang Kaltim. (2018) *Ranwal Renstra Balitbangda Kaltim 2018-2023*
- BPS Kaltim (2017) *Kalimantan Timur Dalam Angka 2017*
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2015). *Will Humans Go the Way of Horses: Labor in the Second Machine Age* Diakses di: <https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-06-16/will-humans-go-way-horses>
- Curado, (2006). The Knowledge Based-View Of The Firm: From Theoretical Origins To Future Implications. *Working Paper 1/*
- Grant, R. M. (1996). Prospering in dynamically competitive environments: Organizational capability as knowledge integration. *Organization Science*, 7(4), 375–387.
- Labadjo, N., (2008), *Lokakarya Pemberdayaan Peran Dan Fungsi Penelitian Dan Pengembangan Daerah. Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri* Cq. Bagian Perencanaan <http://noval-labadjo.blogspot.com/2008/12/lokakaryapemberdayaan-peran-dan-fungsi.html>
- Lakitan, B. (2011) *Indikator Kinerja Lembaga Litbang di Era Informasi Terbuka*, Makalah pengarahan pada Temu Peneliti Badan Litbang dan Diklat VIII Kementerian Agama RI di Makassar tanggal 12-15 April 2011.
- McKillip. (1987) *Need Analysis tools for the Human Service and Education*. Newbury Park. Calif
- OECD. (2002) *Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development*. The Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris
- Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang *Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) no 17 tahun 2016 tentang *Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah*
- Robinson K A, Saldanha I J and Mckoy N A (2011), Development of a Framework to Identify Research Gaps from Systematic Reviews, *Journal of Clinical Epidemiology*, Vol. 64, No. 12, 1325-1330
- Uhl-Bien, M., Marion, R., & McKelvey, B. (2007). Complexity leadership theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledgeera. *The leadership quarterly*, Vol. 18 No. 4, 298-318.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)*